



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

Jalan Pramuka Nomor 9 Padang

Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, Januari 2018
Sekretaris,

Firman, SH.M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
JALAN PRAMUKA RAYA NO.9 BELANTI PADANG
TELEPON 0751 443017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, Januari 2018
Sekretaris,

Firman, SH.M.Si
NIP 19650504 199003 1 008

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp121 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp7.365.494.944 atau mencapai 95,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.680.621.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.312.644.512 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp152.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.297.772.786; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp14.719.726.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp58.011.898 dan Rp4.254.632.614.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7.386.826.477 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp7.386.826.477. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp45.559.271 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp7.341.267.206.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp2.933.646.477 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp7.341.267.206 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.277.758.520 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.384.494.823 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp4.254.632.614.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	121	0,00	301.710.593
JUMLAH PENDAPATAN		-	121	0,00	301.710.593
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.606.167.000	4.462.186.538	96,87	4.383.464.341
Belanja Barang	B.4	2.770.966.000	2.601.836.026	93,90	11.047.950.289
Belanja Modal	B.5	303.488.000	301.472.380	99,34	170.311.000
JUMLAH BELANJA		7.680.621.000	7.365.494.944	95,90	15.601.725.630

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	152.000	600.000
Jumlah Aset Lancar		152.000	600.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2.105.730.000	829.940.980
Peralatan dan Mesin	C.15	2.160.367.430	1.800.957.650
Gedung dan Bangunan	C.16	311.385.000	355.650.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	1.225.776.283	1.225.776.283
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.505.485.927)	(1.259.417.097)
Jumlah Aset Tetap		4.297.772.786	2.952.907.816
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	350.000	350.000
Aset Lain-Lain	C.22	296.037.334	296.037.334
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(281.667.608)	(279.964.273)
Jumlah Aset Lainnya		14.719.726	16.423.061
JUMLAH ASET		4.312.644.512	2.969.930.877
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	58.011.898	36.284.400
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		58.011.898	36.284.400
JUMLAH KEWAJIBAN		58.011.898	36.284.400
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	4.254.632.614	2.933.646.477
JUMLAH EKUITAS		4.254.632.614	2.933.646.477
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.312.644.512	2.969.930.877

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.461.788.338	4.383.862.541
Beban Persediaan	D.3	78.100.200	314.914.340
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.177.399.408	9.107.234.894
Beban Pemeliharaan	D.5	220.001.540	201.872.841
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.155.530.326	1.018.922.799
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	414.751.195
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	294.006.665	249.991.236
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		7.386.826.477	15.691.549.846
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.386.826.477)	(15.691.549.846)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		45.559.271	305.785.023
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		45.559.271	305.785.023
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7.341.267.206)	(15.385.764.823)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7.341.267.206)	(15.385.764.823)

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	2.933.646.477	22.269.513.020
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7.341.267.206)	(15.385.764.823)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	1.277.758.520	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	(250.255.614)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		1.277.758.520	(250.255.614)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7.384.494.823	(3.699.846.106)
EKUITAS AKHIR	E.5	4.254.632.614	2.933.646.477

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum sebagai sebagai suatu lembaga non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum berkomitmen dengan visi *“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan

mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(1) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

(2) Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan

mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey

lapangan untuk objek penilaian selain Tanah

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

(3) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban **(5) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(6) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	4.801.167.000	4.606.167.000
Belanja Barang	1.525.093.000	2.770.966.000
Belanja Modal	85.000.000	303.488.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	6.411.260.000	7.680.621.000

Realisasi
Pendapatan
Rp121

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp121 atau mencapai nol persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	121	-
Jumlah	-	121	-

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2017 mengalami penurunan 100 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan pada TA 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak mendapatkan pendapatan lai-lain selain dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dibandingkan dengan TA 2016 dimana terdapat pendapatan anggaran lain-lain atas pencairan klaim jaminan pelaksanaan kepada kepada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang atas wanprestasi PT. Karya Batam Mandiri Perkasa untuk pembangunann gedung kantor KPU Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.249.905.650,00.(Nomor NTPN: 1100060901010205 tanggal 13 Januari 2016)

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	121	301.710.593	-100,00
Jumlah	121	301.710.593	-100,00

Realisasi
Belanja Negara
Rp7.365.494.94
4

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2017 adalah sebesar Rp7.365.494.944 atau 95,90% dari anggaran belanja sebesar Rp7.680.621.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.606.167.000	4.462.187.651	96,87
Belanja Barang	2.770.966.000	2.601.836.026	93,90
Belanja Modal	303.488.000	301.472.380	99,34
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	7.680.621.000	7.365.496.057	95,90
Pengembalian		(1.113)	-
Jumlah	7.680.621.000	7.365.494.944	95,90

Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar 52.79% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan pada tahun 2016 pada bulan Januari s/d Maret masih dilaksanakan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.462.186.538	4.383.464.341	1,80
Belanja Barang	2.601.836.026	11.047.950.289	(76,45)
Belanja Modal	301.472.380	170.311.000	77,01
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	7.365.494.944	15.601.725.630	(52,79)

*Belanja
Pegawai
Rp4.462.186.538*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.462.186.538 dan Rp4.383.464.341. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,8 persen dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Pembayaran rapel kenaikan tunjangan kinerja pegawai dari bulan Juni s/d Desember 2017
2. Kenaikan Pangkat beberapa PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.657.427.196	1.608.369.167	3,05
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.789.816.455	2.766.254.398	0,85
Belanja Honorarium		0	-
Belanja Lembur	14.944.000	9.827.000	52,07
Belanja Vakasi		-	-
Jumlah Belanja Kotor	4.462.187.651	4.384.450.565	1,77
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.113)	(986.229)	(99,89)
Jumlah Belanja	4.462.186.538	4.383.464.336	1,80

Belanja

Barang

Rp2.601.836.02

6

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.601.836.026 dan Rp11.047.950.289. Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar 76,45% dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja barang non operasional dan belanja barang persediaan barang konsumsi di tahun 2017, karena pada tahun 2016 dari bulan Januari s/d Maret masih dilaksanakan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	342.703.750	340.527.940	0,64
Belanja Barang Non Operasional	500.628.250	8.354.893.742	(94,01)
Belanja Jasa	307.084.110	220.341.838	39,37
Belanja Pemeliharaan	220.001.540	200.672.841	9,63
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.155.530.326	1.019.956.799	13,29
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.888.050	912.931.129	(91,69)
Jumlah Belanja Kotor	2.601.836.026	11.049.324.289	(76,45)
Pengembalian Belanja	-	(1.374.000)	
Jumlah Belanja	2.601.836.026	11.047.950.289	(76,45)

Belanja Modal

Rp301.472.380

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp301.472.380 dan Rp170.311.000. Belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 77.01% dibandingkan TA 2016 disebabkan oleh peningkatan kebutuhan fasilitas peralatan dan mesin terkait dengan telah dimulainya Tahapan Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301.472.380	170.311.000	77,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	301.472.380	170.311.000	77,01
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	301.472.380	170.311.000	77,01

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar nol persen dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp Rp301.472.380 mengalami kenaikan sebesar 9,62 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp750.000.000. Hal ini disebabkan

oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	598.700.000	36.270.000	1550,6
Laptpo		34.155.000	
Peralatan Lainnya	223.415.000	99.886.000	0,0
Jumlah Belanja Kotor	822.115.000	170.311.000	382,7
Pengembalian	-	-	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan TA 2016

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A 2015	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 dan 2017

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2017 dan 2016

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada

bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017 dan 2016

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBPRp0

4 Piutang PNBPRp0

Saldo Piutang PNBPR per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBPR merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPR disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBPR TA 2017 dan 2016

Uraian	TH 2017	TH 2016
Piutang PNBPR	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TagihanTP/TGRRp0

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2017 dan 2016

No	Nama	TH 2017	TH 2016
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2017 dan 2016

No	Nama	TH 2017	TH 2016
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2017 dan 2016

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja
Dibayar di
Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2017 dan 2016

Jenis	TH 2017	TH 2016
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis

pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2017 dan 2016*

Jenis	TH 2017	TH 2016
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.152.000,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 152.000,- dan Rp. 600.000,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016

Persediaan	Tahun 2017	Tahun 2016
Barang konsumsi	152.000	600.000
Jumlah		

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2017 dan 2016

No	Debitur	TH 2017	TH 2016
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2017 dan 2016

No	Debitur	TH 2017	TH 2016
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-
3	xxx	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang TA 2017*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp 2.105.730.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 2.105.730.000 dan Rp 829.940.980. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari hasil revaluasi aset berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan lainnya pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175). Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	829.940.980
Mutasi tambah:	1.275.789.020
Revaluasi aset	1.275.789.020
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2017	2.105.730.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2017

No	Luas (m2)	Lokasi	Nilai
1	2127	Kel. Aia Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang	2.105.730.000
Jumlah			2.105.730.000

Peralatan dan
Mesin
Rp 2.160.367.430

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 2.160.367.430 dan Rp 1.800.957.650. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	1.800.957.650
Mutasi tambah:	359.409.780
Pembelian	294.614.780
Hibah Barang	19.000.000
Perolehan lainnya	45.795.000
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2017	2.160.367.430
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-1.501.906.789
Nilai Buku per 31 Desember 2017	658.460.641

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

1. Alat kantor dan rumah tangga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Unit	Rupiah (Rp)
Pembelian		
1. Display	52	70.070.000
2. Alat perekam suara	5	6.435.000
3. Handy cam	2	19.781.080
4. Lampu	21	4.857.000
Hibah PT IPC		
1. Meja resepsionist	1	5.000.000
2. Kusri staniless	2	4.000.000
3. AC	1	5.000.000
Perolehan Lainnya PT. Semen Padang		
1. AC Panasonic 2 PK	1	5.450.000
2. Televisi	1	14.200.000
3. Lemari	1	10.000.000
4. Kursi stainless	1	2.000.000
5. Meja resepsionist	1	6.000.000

2. ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

Uraian Jenis Transaksi	Unit	Rupiah (Rp)
Pembelian		
1. Tripod Camera	2	1.432.850
2. Camera digital	1	8.260.000

3. Alat Laboratorium

Uraian Jenis Transaksi	Unit	Rupiah (Rp)
Pembelian		
1. Serial scanner/printer	1	22.030.470
2. Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	613.800

4.Komputer

Uraian Jenis Transaksi	Unit	Rupiah (Rp)
Pembelian		
1. PC Unit	1	7.350.000
2. Personal komputer lainnya	8	109.965.290
3. Serial printer	5	26.219.750
4. Hard disk	2	3.246.540
5. Printer	1	2.410.000
6. Scanner	1	16.800.000
Hibah IPC		
1. Laptop	1	8.145.000

5.Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan

Uraian Jenis Transaksi	Unit	Rupiah (Rp)
Pembelian		
1. Miniatur/maket Rumah Pintar Pemilu	1	5.000.000

Tidak terdapat mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan aset yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp 0,-. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan Bangunan
Rp. 311.385.000*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 311.385.000 dan Rp. 355.650.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	355.650.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi BMN	(44.265.000)
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2017	311.385.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(46.234.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	265.150.500

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari pengurangan nilai gedung sesuai dengan hasil revaluasi BMN senilai Rp. 44.265.000,-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan
dan Irigasi Rp
0,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- . Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2017	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

Aset Tetap
Lainnya
Rp0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,- . Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku per 31 Desember 2017	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan Rp
1.225.776.283

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.225.776.283,- dan Rp 1.225.776.283,- yang merupakan pembangunan gedung kantor KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. By Pass Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Padang yang proses pengerjaannya dihentikan diakibatkan wanprestasi oleh kontraktor PT. Karya Batam Mandiri Perkasa(kontrak Nomor 01/Kont-Fisik/KPU-Sumbar/IX/2013 tanggal 2 September 2013) dengan alamat Jln. Pelabuhan Ratu Blok A5 No. 2 Bumi Bekasi Baru Provinsi Jawa Barat dengan laporan kemajuan pekerjaan (progres pekerjaan) sebesar 22,383 % dan pembayaran untuk biaya konsultan pengawas **CV.Artistik Engineering Consultant** di Jalan Padang Pasir VII, nomor 12, Padang sesuai kontrak nomor 13/Pws/KPU-Sumbar/IX/2013 tanggal 23 September 2013 serta administrasi belanja modal untuk pembangunan kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Mutasi nilai KDP tersebut adalah Pencairan Klaim jaminan Pelaksanaan a/n PT Karya Batam Mandiri Perkasa senilai Rp 249.905.650,-

Terdapat mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	1.225.776.283
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2017	1.225.776.283
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku per 31 Desember 2017	1.225.776.283

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
1.505.485.927

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp 1.505.485.927,- dan Rp 1.259.417.097,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2017 dan 2016

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.160.367.430	1.501.906.789	658.460.641
2	Gedung dan Bangunan	311.385.000	3.579.138	307.805.862
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	0		0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		2.471.752.430	1.505.485.927	966.266.503

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp350.000

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp350.000,- dan Rp 350.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Aset Tak Berwujud pada KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan anti virus yang diadakan satu paket dengan komputer dan printer untuk pengelolaan data kepegawaian tahun 2011. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	350.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2017	350.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017	(350.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

Aset Lain-Lain
Rp 296.037.334

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 296.037.334 dan Rp 296.037.334. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	296.037.334
Mutasi tambah:	
Aset tetap tidak digunakan	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2017	296.037.334
Akumulasi Penyusutan	281.317.608
Nilai Buku per 31 Desember 2017	14.719.726

Transaksi penambahan aset lain-lain adalah penambahan dari aset tetap yang tidak digunakan karena rusak berat senilai Rp. 0,-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp 281.667.608

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp281.667.608,- dan Rp 279.964.273. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	350.000	350.000	0
Jumlah	350.000	350.000	0
Aset Lain-lain	296.037.334	281.317.608	14.719.726
Jumlah	296.387.334	281.667.608	14.719.726

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka
dari KPPN Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp58.011.898

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp58.011.898 dan

Rp36.284.400. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga (CV. Restu Graha Cipta)	35.445.000	Belanja jasa konsultan perencanaan yang belum dibayar sampai tanggal 31 Desember 2012
Utang pada pihak ketiga (Listrik)	22.085.898	Belanja jasa langganan air Bulan Desember 2017
Utang pada pihak ketiga (PDAM)	481.000	Belanja jasa langganan air Bulan November dan Desember 2017
Total	58.011.898	

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Total	-

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2017 dan TA 2016*

Uraian	TH 2017	TH 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp4.254.632.614

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.254.632.614 dan Rp2.933.646.477. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp0

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban
Pegawai
Rp4.461.788.338

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.461.788.338 dan Rp4.383.862.541. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.657.027.883	1.607.781.145	3
Beban Tunjangan-tunjangan	2.789.816.455	2.766.254.396	1
Beban Honorarium dan Vakasi	-		0
Beban Lembur	14.944.000	9.827.000	52
Jumlah	4.461.788.338	4.383.862.541	2

Beban
Persediaan
Rp78.100.200

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp78.100.200 dan Rp314.914.340. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	78.100.200	314.914.340	-75
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	78.100.200	314.914.340	-75

Beban Barang
dan Jasa
Rp1.177.399.408

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.177.399.408 dan Rp9.107.234.894. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	233.159.100	216.774.400	7,56
Beban Pengiriman surat dinas pos	1.634.650	1.473.540	10,93
Beban Honor Operasional Satker	89.500.000	103.880.000	(13,84)
Beban Barang Operasional Lainnya	18.410.000	18.400.000	0,05
Beban Bahan	246.578.250	460.849.424	(46,49)
Beban Honor Output Kegiatan	254.050.000	4.304.883.450	(94,10)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	3.780.900.292	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa	126.190.808	110.323.788	14,38
Beban Sewa	10.100.000	4.000.000	152,50
Beban Jasa Profesi	52.200.000	64.750.000	(19,38)
Beban Jasa Lainnya	140.719.000	41.000.000	243,22
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	4.857.600	0	0,00
Jumlah	1.177.399.408	9.107.234.894	(87,07)

Beban
Pemeliharaan
Rp220.001.540

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp220.001.540 dan Rp201.872.841. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97.140.600	67.962.206	42,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122.860.940	132.710.635	(7,42)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan		1.200.000	(100,00)
Jumlah	220.001.540	201.872.841	8,98

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.155.530.326

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.155.530.326 dan Rp1.018.922.799. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban

perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	747.578.256	874.768.199	-14,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000	4.135.000	407,86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	336.395.000	107.155.000	213,93
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50.557.070	32.864.600	53,83
Jumlah	1.155.530.326	1.018.922.799	13,41

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp414.751.195. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	414.751.195	(100,00)
Jumlah	0	414.751.195	(100,00)

Beban
Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp294.006.66
5

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp294.006.665 dan Rp249.991.236. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2017 dan 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	285.167.692	241.174.902	18
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.135.638	7.113.000	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.703.335	1.703.334	0
Jumlah Penyusutan	294.006.665	249.991.236	18
			-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	294.006.665	249.991.236	18

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp45.559.271

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisist dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA yang Lalu	121	51.804.943	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TA yang lalu	0	249.905.650	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	45.795.000	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	812.350	4.208.430	-
Beban Penyesuain Nilai Persediaan	-1.048.200	-134.000	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	45.559.271	305.785.023	(85,10)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp2.933,646,477

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.933.646.477 dan Rp22.269.513.020.

Defisit LO

Rp7.341.267.206

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp7.341.267.206 dan Rp15.385.764.823. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Rp1.277.758.520 Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.227.758.520 dan Rp0. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah milik satker KPU Provinsi Sumatera Barat.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0 **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp250.255.614. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2017

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0 **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.384.494.823 dan

Rp(3.699.846.106). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(121)
Ditagikan ke Entitas Lain	7.365.494.944
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	19.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	7.384.494.823

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp(121) sedangkan DKEL sebesar Rp7.365.494.944

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Rp -	-
2	Persediaan	Rp -	-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,-

**E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian
Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp19.000.000, yang diterima sepanjang tahun 2017 dari PT. IPC Pelabuhan Teluk Bayur berupa barang .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	PT. IPC Pelabuhan Teluk	Barang	Rp 19.000.000
Total Pengesahan			Rp 19.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp 19.000.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp4.254.632.614

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.254.632.614 dan Rp2.933.646.477

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2017.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 19/HK.03.2-Kpt/Sek-Prov/IV/2017 Tentang Perubahan atas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/Kpts/Sesprov-003/TAHUN 2017 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggu Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Firman, SH.M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Jumiati, S.Ip
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Arlis, SP
Bendahara	: Novria, A.Md

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : Firman, SH.M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen : Jumiati, S.Ip
Pejabat Penandatangan/Penguji :Yurika Amalia, SE
SPM
Bendahara : Novria, A.Md

Sekretaris

Firman, SH.M.Si
NIP. 19650504 199001

Lampiran I: Penyusutan Aset Tetap

KOMISI PEMILIHAN UMUM SATKER PROVINSI SUMATERA BARAT
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2016	Sstr 1 2017	Per 30-06-2016	Per 31-12-2016
A	Tanah						
1	Tanah	-	2.105.730.000	-	-	-	2.105.730.000
	Jumlah		2.105.730.000	-	-	-	2.105.730.000
B	Peralatan dan Mesin						
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	360.000.000	328.571.423	31.428.577	360.000.000	-
5	Alat Kantor	101	311.062.950	166.985.950	34.949.500	201.935.450	109.127.500
6	Alat Rumah Tangga	125	377.236.080	192.521.000	50.355.108	242.876.108	134.359.972
7	Alat Studio	13	80.352.850	46.175.000	8.879.285	55.054.285	25.298.565
8	Alat Komunikasi	4	8.332.000	6.832.000	1.000.000	7.832.000	500.000
9	Peralatan Pemancar	1	350.000	210.000	35.000	245.000	105.000
10	Peralatan Komunikasi Navigasi	2	2.000.000	466.662	133.332	599.994	1.400.006
11	Alat Kesehatan Umum	1	4.750.000	4.750.000	-	4.750.000	-
13	Unit Alat Laboratorium	10	54.941.270	6.869.487	2.907.942	9.777.429	45.163.841
18	Komputer Unit	42	475.391.790	259.964.625	55.808.161	315.772.786	159.619.004
19	Peralatan Komputer	50	480.950.490	203.392.950	99.170.787	302.563.737	178.386.753
22	Alat peraga pelatihan dan percontohan	1	5.000.000	-	500.000	500.000	4.500.000
	Jumlah		2.160.367.430	1.216.739.097	285.167.692	1.501.906.789	658.460.641
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	311.385.000	42.678.000	7.135.638	3.579.138	307.805.862
	Jumlah		311.385.000	42.678.000	7.135.638	3.579.138	307.805.862
D	Aset Tetap Yang Tidak						
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	140	294.844.284	279.614.273	1.703.335	281.317.608	13.526.676
	Jumlah		294.844.284	279.614.273	1.703.335	281.317.608	13.526.676
E	Aset Tetap Lainnya						
1	Software	1	350.000	-	-	350.000	-
	Jumlah		350.000	-	-	350.000	-
Total			4.872.676.714	1.259.417.097	292.303.330	1.505.835.927	3.071.996.503

Lampiran II: Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2017

No	Uraian	Lokasi	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan
1	Gedung Tempat Kerja	KPU Provinsi Sumatera Barat	01/Kont-Fisik/KPU-Sumbar/IX/2013	4.998.113.000	24,52%	1.225.776.283
	JUMLAH					1.225.776.283

Lampiran III: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2017

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	PT IPC Pelabuhan Teluk Bayur	Barang	DN	Rp 19.000.000		Rp 19.000.000	
Jumlah				Rp 19.000.000	Rp -	Rp 19.000.000	